

BAB 1

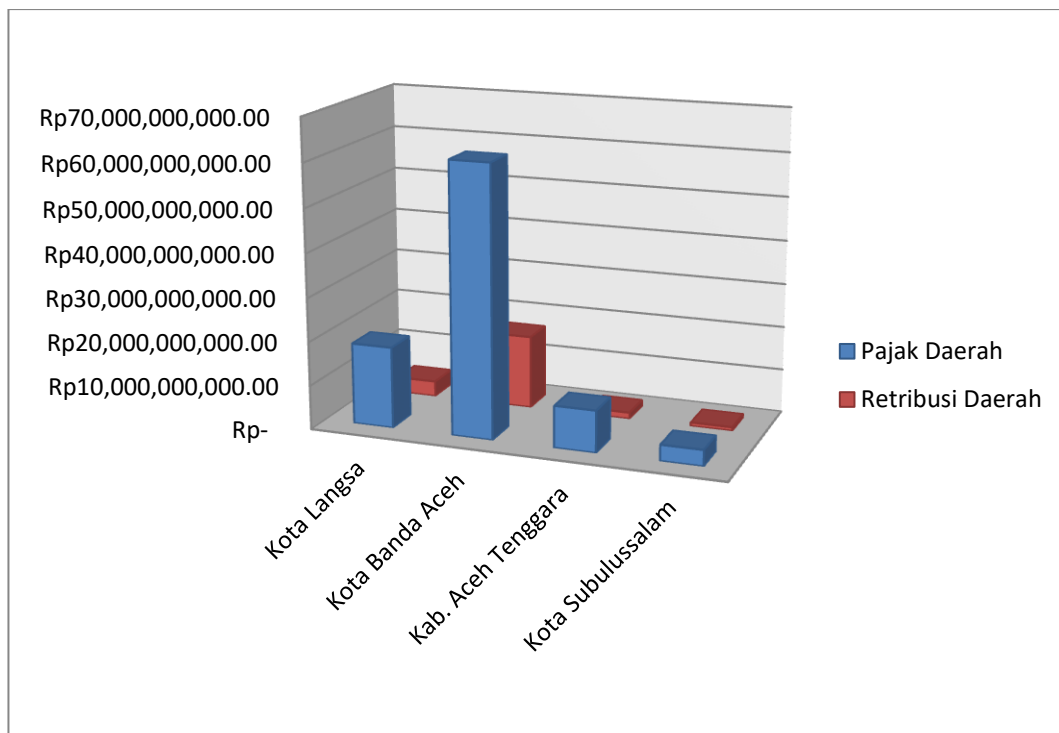
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara perlu diperseverasi secara berkelanjutan. Ketika laju pertumbuhan ekonomi terhambat, kemajuan ekonomi dapat terhenti. Hal ini berlaku khususnya di Indonesia, di mana faktor keuangan menjadi aspek yang paling vital ketika membahas pertumbuhan ekonomi, terutama dalam skala sebesar Indonesia. Jika keuangan tidak solid dan stabil, upaya meningkatkan perekonomian bangsa akan mengalami hambatan. Diperlukan keahlian khusus dari para ahli yang memahami dinamika tersebut untuk mengelola situasi ini. Selain pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi, penanganan masalah kemiskinan juga perlu diperhatikan. Tingkat kemiskinan di Indonesia semakin memprihatinkan dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, diperlukan manajemen keuangan yang efektif. Masalah yang berkaitan dengan keuangan hanya dapat diatasi dengan menggunakan sumber daya keuangan yang memadai. Dengan manajemen keuangan yang cermat, dana negara dapat dialokasikan secara optimal untuk menangani permasalahan kemiskinan (DJKN 2022).

Penelitian oleh (Sudarmana and Sudiarta 2020) memberikan bukti bahwa PAD sangat dipengaruhi oleh pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamaan. Hasil ini menunjukkan bahwa PAD akan tumbuh seiring dengan peningkatan pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan pada PAD, seperti yang ditunjukkan oleh temuan ini.

Pajak lokal berdampak positif dan signifikan pada PAD pemerintah daerah. Penemuan ini menunjukkan bahwa PAD pemerintah (Pendapatan Asli Daerah) sebanding dengan pajak daerah yang lebih tinggi. Studi lain (Natoen, Febriyanti, dan Susi 2017) menemukan bahwa variabel pajak daerah berdampak positif dan signifikan pada PAD. Dengan kata lain, pajak daerah adalah faktor utama yang memengaruhi pendapatan asli daerah. PAD, bagaimanapun, tidak secara signifikan dipengaruhi oleh variabel retribusi daerah.



Gambar 1.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertinggi dan terendah di Provinsi Aceh Tahun 2022

Sumber : DJPK Kemenkeu, 2022

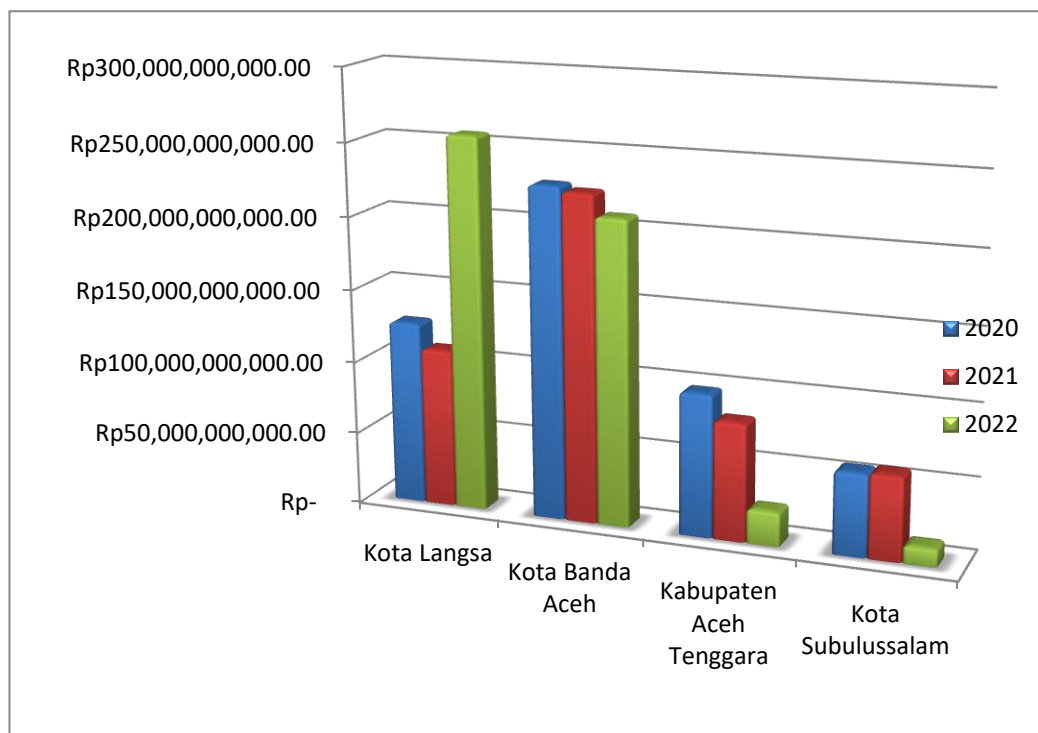
Pada tahun 2022, Kota Banda Aceh menerima pajak dan retribusi daerah tertinggi di Provinsi Aceh dengan mencapai Rp 61.210.000 untuk pajak daerah dan

Rp 16.710.000.000 untuk retribusi daerah. Tidak hanya pada tahun 2022 saja, namun pada tahun 2019 juga pernah mencapai puncak pajak daerah tertingginya hingga mencapai Rp 85.240.000.000. Kota Langsa berada di posisi kedua dengan pajak daerah 18.500.000.000 dan retribusi daerah 3.500.000.000. Penghasil terendah kedua adalah Kabupaten Aceh Tenggara, yang memiliki pajak daerah 9.500.000.000 dan retribusi daerah 1.410.000.000. Kota Subulussalam menempati urutan pertama dengan pajak daerah Rp 3.620.000.000 dan retribusi daerah yang hanya mencapai Rp 800.000.000 saja (DJPK 2022).

Seperti provinsi-provinsi lain di Indonesia, Provinsi Aceh memiliki otonomi dalam mengelola wilayahnya sendiri. Tingkat kemandirian daerah menjadi penentu utama kinerja pemerintah daerah yang akan meningkat jika tingkat kemandirian tinggi dan menurun jika tingkat kemandirian rendah. Untuk meningkatkan kinerja, Provinsi Aceh memiliki banyak sumber daya yang dapat digunakan. Namun, pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) masih belum optimal, dan daerah terus bergantung pada pemerintah pusat secara signifikan. Perbedaan dalam tingkat kemandirian juga terjadi di antara daerah, khususnya antara Kabupaten dan Kota. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh faktor geografis seperti luas wilayah, kepadatan penduduk, dan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebuah penelitian oleh (Asri 2016) mengungkapkan adanya perbedaan kemandirian daerah, di mana pemerintah kota memiliki tingkat autonomi yang lebih tinggi daripada pemerintah kabupaten.

Provinsi Aceh memiliki 23 daerah pemerintahan, terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota. Sebagian besar dari 23 kabupaten dan kota ini masih bergantung pada

pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten dan kota memiliki tingkat efektivitas yang berbeda. Beberapa sangat efektif, sedangkan yang lain kurang efektif. (Zulkarnain et al. 2020). Berikut ini data PAD tertinggi dan terendah di Provinsi Aceh untuk tahun 2020-2022 sebagai berikut:



Gambar 1.2 PAD tertinggi dan terendah di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Sumber : DJPK Kemenkeu, 2022

Dengan anggaran sebesar Rp 256.920.000.000, Langsa menjadi penerima PAD terbesar pada tahun 2022, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.2. Kenaikan anggaran PAD Kota Langsa tersebut bisa dikatakan sangat drastis karena hampir mencapai 50 persen dari tahun sebelumnya. Lalu diikuti oleh Kota Banda Aceh mencapai anggaran Rp 227.750.000.000 pada tahun 2020. Namun untuk Kabupaten Aceh Tenggara sebagai penerima PAD kedua terendah pada tahun 2022

yang hanya memperoleh PAD dengan jumlah Rp 23.650.000.000. Kota Subulussalam menduduki urutan pertama dengan Kabupaten/Kota penerima PAD terendah pada tahun 2022 yang hanya memperoleh PAD dengan jumlah Rp 12.360.000.000 (DJPK Kemenkeu, 2022). PAD telah meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah, tetapi tidak secara merata. PAD yang signifikan hanya dapat diberikan oleh beberapa daerah. Peningkatan PAD selalu diikuti oleh peningkatan pajak dan retribusi daerah, tetapi di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, peningkatan PAD tidak disebabkan oleh faktor tersebut.(DJPK Kemenkeu, 2022).

Singkatnya, *input* yang besar tidak selalu menghasilkan *output* yang optimal juga; ini menunjukkan bahwa area ini tidak efisien. Efisiensi adalah kemampuan untuk menggabungkan *input* yang sudah ada dengan *output* yang sudah ada sehingga menghasilkan ukuran kinerja yang diharapkan. Suatu organisasi dapat menilai kinerja keuangannya dengan mengukur seberapa efisien ia bekerja. Pendekatan pengukuran *frontier* lebih sering digunakan daripada pengukuran manual dalam penelitian ini. Metode *frontier* mengukur menggunakan batasan-batasan tertentu selama prosesnya. Batasan: Batasan ini menunjukkan bagaimana perusahaan bertindak untuk memaksimalkan input atau meminimalkan *output* untuk mendapatkan keuntungan. Pendekatan *frontier* lebih baik daripada pendekatan *outlier* karena hasil pengukuran, yang dapat diperoleh dari ukuran numerik kinerja relatif, lebih objektif. Pendekatan *frontier* dapat mengambil banyak hal. (Coelli et al. 2005).

Ada lima cara berbeda untuk mengukur efisiensi dengan pendekatan *frontier*. Ada lima pendekatan yang tersedia: analisis *envelopment data* (DEA), gundukan bebas (FDH), pendekatan batas *stochastic* (SFA), pendekatan batas tipis (TFA), dan pendekatan bebas distribusi (DFA). Studi ini menggunakan metode pengolahan data non-parametrik (DEA). Menghitung rasio *input* dan *output* menggunakan metode *frontier* non-parametrik DEA untuk setiap unit populasi yang dibandingkan menggunakan model program linier. DEA menghitung seberapa efektif setiap komponen secara teknis, dengan skor yang relatif tergantung pada seberapa baik komponen lain berfungsi dalam sampel. Sebuah tingkat efisiensi yang tidak negatif diidentifikasi untuk setiap unit sampel. Tingkat efisiensi yang sempurna ditunjukkan dengan nilai 0 hingga 1, dan envelope *frontier* efisiensi dibuat dari unit dengan nilai satu ini. Sementara itu, unit lain menunjukkan tingkat inefisiensi di dalam envelope. (Choelli, 2005:161).

DEA digunakan lebih sering dalam penelitian perhitungan efisiensi dan memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan metode *frontier* lainnya. DEA dipilih karena kemampuan untuk mengidentifikasi unit referensi yang dapat membantu menentukan sumber ketidakefisienan dan menyelesaikannya. DEA ini menjadi manfaat besar dalam aplikasi manajemen. Selain itu, DEA memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai *input* dan *output* tanpa mempertimbangkan karakteristik fungsi dari variabel *input* dan *output*. Setelah itu, Hasil analisis DEA dapat digunakan untuk mengembangkan metode baru yang meningkatkan kinerja keuangan daerah, yang akan menguntungkan pertumbuhannya sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin menyelidiki kinerja keuangan daerah dengan menentukan tingkat efisiensi keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan ini, mereka akan menggunakan metode yang dikenal sebagai analisis pengumpulan data. Kemudian bermaksud menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **"EFISIENSI KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN *DATA ENVELOPMENT ANALYSIS* (DEA) PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH"**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan data ini, masalah penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi kinerja keuangan daerah Provinsi Aceh dengan menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)?
2. Bagaimana pajak daerah dan retribusi daerah berdampak pada PAD Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas:

1. Analisis *Envelopment* Data (DEA) digunakan untuk menentukan tingkat efisiensi kinerja keuangan daerah Provinsi Aceh.
2. Meneliti dampak Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa keuntungan teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut yang diharapkan bermanfaat bagi semua orang, terutama penulis.

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis atau Peneliti

Dengan penelitian ini, penulis dapat membandingkan teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan fakta di lapangan tentang kinerja pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh berdasarkan rasio pendapatan daerah pada APBD. Dengan penelitian ini, penulis akan dilatih dalam memecahkan masalah, mendefinisikan masalah, dan menganalisis situasi. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi seberapa luas teori tersebut dapat digunakan dan diterapkan di lingkungan luar kampus.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai contoh dan panduan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan di semua kabupaten dan kota Provinsi Aceh.

3. Bagi Pembaca/Masyarakat

Studi ini dapat digunakan sebagai referensi, data, dan perbandingan untuk perbaikan dan reorganisasi kebijakan kinerja keuangan daerah Provinsi Aceh.

4. Bagi Peneliti Lain

Penulis berharap lebih banyak variabel akan membuat penelitian selanjutnya lebih baik lagi. Ini akan menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi rekan kerja yang mencoba menyelesaikan masalah yang sama.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini bertujuan untuk membantu pemerintah dan lembaga menjadi organisasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan mampu mencapai kinerja keuangan daerah yang optimal di semua kota dan kabupaten Provinsi Aceh.
2. Sebagai sumber untuk membandingkan teori dengan situasi di lapangan.
3. Berfungsi sebagai referensi dalam bidang penelitian yang serupa untuk pengembangan penelitian tambahan.
4. Sebagai pengembangan dari konsep analisis kinerja keuangan secara keseluruhan.